



**TINDAK LANJUT HASIL
MONEV PEMBANGUNAN ZI TRIWULAN IV
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TA 2018**

DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Piagam penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta KPK RI dan Kapolri kepada Dittipidkor Bareskrim Polri atas Prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas korupsi (WBK) pada tanggal 12 Desember 2017 di Jakarta;
- f. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/339/VII/2018/Tipidkor tanggal 19 Juli 2018 tentang tim pokja internal dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi predikat WBK;
- g. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI Triwulan IV Dittipidkor Bareskrim Polri Tahun 2018.

PEMBAHASAN

Tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang telah diperoleh oleh Dittipidkor Bareskrim Polri.

Upaya yang dilakukan antara lain Melengkapi bukti dukung yang dapat dituangkan pada setiap komponen pengungkit sesuai dari hasil monev Triwulan IV yang telah dilaksanakan, antara lain:

a. Manajemen Perubahan:

- Pelaksanaan kerja sama terhadap media cetak dapat dimasukkan pada anggaran pameran Hari anti korupsi yang telah dianggarkan pada TA 2018 ini.

Agar dipertimbangkan untuk tahun anggaran kedepan dapat dianggarkan tersendiri.

- Pada Humas Polri dapat menyerahkan dokumen pendukung media dapat berupa tabloid Polri.

b. Penata Tatalaksana:

Dengan diterbitkan Perkap Nomor 3 Tahun 2018 maka perlunya koordinasi lebih lanjut pada Bagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri untuk pengesahan SOP/Piranti Lunak yang ada.

c. Penataan Sistem Manajemen SDM:

Hal ini tidak mengalami perubahan pasca penetapan WBK.

Jumlah personel pada Dittipidkor Bareskrim Polri sangat kekurangan personel jauh dari DSP yang seharusnya. Dimana apabila sesuai dengan Perkap no 6 tahun 2017 tentang SOTK Polri tingkat Mabes berjumlah 135 personel saat ini hanya terdapat 90 personel.

d. Penguatan Akuntabilitas:

Peningkatan sosialisasi perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan perlu ditingkatkan guna penerbitan keterbukaan pada seluruh personel Dittipidkor Bareskrim Polri

e. Penguatan Pengawasan:

Perlu adanya kesepakatan antara Dittipidkor Bareskrim Polri dengan Itwasum Polri terkait pelaksanaan pelaporan WBS yang ada termasuk websitenya karena masing-masing Satker memberikan pelayanan yang sama demikian halnya dengan benturan kepentingan.

f. Peningkatan kualitas pelayanan Publik:

- Membuat rencana kebutuhan Anggaran terhadap inovasi pada pelayanan yang diakses melalui website Dittipidkor jika diperlukan
- Menunjuk personel pengemban oprasi website dengan Menerbitkan surat perintah agar dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

KESIMPULAN

Tindak lanjut hasil monev Triwulan IV ini dilaksanakan dan dipenuhi dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya pada rapat monev kedepan dengan menampilkan bukti dukung yang ada dengan tujuan pengajuan peningkatan Predikat dari WBK menjadi WBBM.

PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi pembangunan ZI TW IV dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai gambaran kepada pimpinan sejauh mana pelaksanaan evaluasi untuk menjaga kelangsungan predikat WBK yang telah diperoleh oleh Dittipidkor Bareskrim Polri guna dapat ditingkatkan predikatnya menjadi WBBM.

Jakarta, 17 Desember 2018

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI


ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI